

AGILE GOVERNANCE: TRANSFORMASI TATA KELOLA PARIWISATA TELUK TOMINI, INDONESIA

Yanti Aneta¹, Resmiyati Yunus², Rahmatia Pakaya³, Pebriyanto A. Hulinggi⁴
Universitas Negeri Gorontalo
yantianeta@ung.ac.id¹, resmiyatiyunus@ung.ac.id², rahmatia_pakaya@ung.ac.id³,
pebrihulinggi@ung.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Transformasi Tata Kelola Pariwisata Teluk Tomini melalui penerapan *Agile Governance* sebagai strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata Teluk Tomini, Gorontalo. *Agile Governance* merupakan pendekatan tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, memungkinkan organisasi publik untuk menghadapi tantangan yang dinamis. Revitalisasi kelembagaan dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, sinergi antar pemangku kepentingan, serta memperkuat peran SDM dalam mengelola destinasi wisata unggulan di Teluk Tomini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Agile Governance* dapat meningkatkan fleksibilitas dalam tata kelola, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memperbaiki kualitas SDM dalam pengelolaan pariwisata. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ego sektoral, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya kompetensi SDM lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Agile Governance* dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah jika didukung oleh kebijakan yang inklusif dan kolaboratif.

Kata Kunci: *Agile Governance*, Revitalisasi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This study aims to examine the Transformation of Tomini Bay Tourism Governance through the application of Agile Governance as a strategy to improve human resources in the tourism sector of Tomini Bay, Gorontalo. Agile Governance is a governance approach that is responsive and adaptive to change, enabling public organizations to face dynamic challenges. Institutional revitalization in this context aims to increase the effectiveness of coordination, synergy between stakeholders, and strengthen the role of human resources in managing leading tourist destinations in Tomini Bay. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The data collection technique was carried out through in-depth interviews and analysis of related policy documents. The results of the study show that the implementation of Agile Governance can increase flexibility in governance, strengthen cross-sector synergy, and improve the quality of human resources in tourism management. The main challenges faced include sectoral egos, limited funding, and lack of competence of local human resources. This study concludes that Agile Governance can be an effective solution in increasing regional tourism competitiveness if supported by inclusive and collaborative policies.

Keywords: Agile Governance, Institutional Revitalization, Human Resources.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pariwisata di Kawasan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan keindahan alam yang menonjol seperti Pantai Olele, Pulau Saronde, dan Pulau Cinta, kawasan ini telah lama dikenal sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, permasalahan dalam tata kelola pariwisata, termasuk ego sektoral, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, dan ketidakjelasan wewenang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, masih menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi potensi kawasan tersebut. Pendekatan birokrasi tradisional sering kali menyebabkan fragmentasi kebijakan, di mana program-program pariwisata berjalan secara parsial tanpa adanya koordinasi yang baik. Adapun dalam organisasi pemerintahan penyederhanaan prosedur administrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat pelayanan publik (Aneta et al., 2023).

Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan destinasi wisata berjalan secara terpisah-pisah dan menurunkan daya saing kawasan sebagai tujuan wisata utama. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pendekatan yang lebih responsif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan serta aspirasi masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Agile Governance, yang menekankan pada tata kelola yang lentur, kolaboratif, dan berfokus pada pencapaian hasil. Pendekatan ini dinilai relevan dalam merespons tantangan kompleks dalam pengelolaan sektor pariwisata. Temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang ada belum memberikan dampak nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya pengembangan potensi wisata alam dan budaya akibat keterbatasan anggaran, sementara di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang cukup besar.

Berdasarkan Data BPS 2022, jumlah wisatawan mancanegara menurun. Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa tamu wisata mancanegara lebih sedikit dibandingkan dengan wista nusantara, hal ini mengindikasikan bahwa Gorontalo belum mampu menarik perhatian wisatawan untuk betah berlama-lama tinggal menikmati obyek wisata di Gorontalo.



Gambar 1
Jumlah Wisatawan

Permasalahan lainnya adalah munculnya aktor kebijakan yang akan mengklaim bahwa sektor tersebut berada dalam kekuasaan mereka. Pada tahapan inilah kemudian muncul konflik kepentingan dari berbagai aktor, mulai dari pihak pemerintah daerah dengan misi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Swasta atau pihak investor yang berorientasi pada profit, sampai pada masyarakat lokal yang menggantungkan mata pencahriaan di lokasi wisata tersebut. Ini menarik untuk diteliti karena ada beberapa objek wisata yang dulunya pernah menjadi andalan daerah kabupaten/kota masing-masing, namun sekarang kondisinya kurang berkembang.

Kecenderungan para implementor kebijakan berpengaruh dalam penggunaan wewenang dalam pengambilan sebuah kebijakan. Jika para pemangku kepentingan mempunyai misi yang berbeda dari badan-badan pelaksana, maka program badan-badan tersebut cenderung “*distorsi*”. Lebih lanjut kecenderungan gtersebut akan menyebabkan “*fragmentasi*” birokrasi karena unit-unit organisasi serta para pihak yang memiliki kepentingan saling berebut sumber-sumber dan otonomi.

Masalah ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di daerah. Jika ditelaah lebih jauh, terdapat berbagai kendala yang turut memperlambat kemajuan sektor ini. Beberapa di antaranya meliputi: (1) masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan industri pariwisata, (2) kurangnya kelengkapan fasilitas penunjang (amenitas) yang menjadi elemen penting dalam mendukung kenyamanan wisatawan, (3) belum optimalnya distribusi manfaat ekonomi dari pertumbuhan sektor pariwisata akibat lemahnya kelembagaan, (4) potensi terhambatnya kesinambungan program akibat dinamika politik, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan daerah, serta (5) belum adanya keterlibatan investor dalam mendukung pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Selanjutnya untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan atau metode tata kelola pemerintah yang baik yaitu pendekatan *Agile Governance*. *Agile Governance* adalah cara mengelola pemerintahan dengan cepat dan responsif, memungkinkan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisien (Luqmani & Tamrin, 2022). Keunggulan pendekatan *Agile Governance* adalah melakukan implikasi terhadap birokrasi, focus pada sarat kecepatan dan kemudahan. Berfikir *out of the box* serta perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dilakukannya revitalisasi fungsi pemerintah daerah melalui *Agile Governance* dalam pengelolaan pariwisata adalah: 1) Menjaga agar tujuan/program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan benar. 2) Menjaga agar pelaksanaan Program Pemerintah dapat dilakukan dengan waktu relative singkat dengan menggunakan semua aspek perubahan yang efektif. 3) Menciptakan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan cerdas.

Selanjutnya untuk melihat kebaruan penelitian dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, Erlinda (2021) menjelaskan bahwa revitalisasi merupakan proses menghidupkan kembali tradisi lama melalui bentuk atau pendekatan baru, tanpa menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya (Saputri et al., 2021). Dalam konteks organisasi, Gouillart dan Kelly menekankan bahwa revitalisasi berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan, dengan cara menyelaraskan arah organisasi terhadap dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sedarmayanti (2010:79) mengemukakan bahwa revitalisasi dapat menjadi strategi dalam penataan kelembagaan, yang bertujuan memberikan energi baru bagi organisasi agar mampu meningkatkan kinerjanya. Revitalisasi ini mencakup perumusan ulang tugas dan wewenang, pengalokasian anggaran secara lebih tepat, serta penguatan instrumen pendukung pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, Sedarmayanti (2010:14) menegaskan bahwa berbagai dimensi administrasi dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik saling berkaitan secara sistemik, dan dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek utama seperti kelembagaan, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.

Agile Governance, yang juga dikenal sebagai konsep pemerintahan cerdas, gesit, atau responsif, menawarkan pendekatan baru dalam tata kelola organisasi publik. Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan proses birokrasi, menekankan kecepatan dan kemudahan layanan, mendorong cara berpikir yang inovatif dan tidak konvensional, serta mengarahkan terciptanya sistem pemerintahan yang efisien dan akuntabel. *Agile Governance* hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan model birokrasi yang lebih adaptif dan modern. Secara umum, konsep ini merujuk pada kapasitas suatu organisasi untuk secara cepat dan efektif menanggapi perubahan yang tidak terduga, dalam rangka memenuhi ekspektasi dan

tuntutan masyarakat yang terus berkembang. *Agile governance* terdiri dari enam aspek: faktor lingkungan, faktor moderator, kemampuan tangkas, kemampuan tata kelola, operasi bisnis, dan penyampaian nilai (Danan et al., 2024).

Penerapan konsep Agile Governance bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital saat ini, konsep ini mampu merespons berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis. Istilah agile yang awalnya berasal dari dunia pengembangan perangkat lunak (software), secara analogis memerlukan brainware yaitu sumber daya manusia yang visioner dan inovatif guna menciptakan sistem pemerintahan yang mudah diakses, cepat dalam pelayanan, dan unggul dalam kualitas. Sejalan dengan visi “Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatur pentingnya transformasi digital melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menekankan pentingnya inovasi berbasis teknologi informasi oleh setiap kepala daerah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemudahan layanan bagi instansi pemerintah pusat, daerah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, individu, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang terhubung dengan ekosistem SPBE.

Agile Governance sebagai dasar perubahan tata kelola yang mengikuti perkembangan zaman secara cepat, serta memberikan yang terbaik dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat adalah kolaborasi dari revolusi industry 4.0 dan society 5.0 yang diharapkan mampu menciptakan inovasi instant yang dapat diakses oleh seluruh kalangan dan seluruh instansi. Secara keseluruhan bahwa penelitian ini merupakan penelitian terbaru, sebab belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga ini menjadi hal penting untuk diteliti, dengan adanya pandangan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama pandangan secara keilmuan administrasi publik.

Tujuan penelitian ini adalah menggali lebih dalam tentang kajian Revitalisasi Fungsi Kelembagaan melalui *Agile Governance* sebagai strategi peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Teluk Tomini, Gorontalo, Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Agile Governance dapat memperkuat fungsi kelembagaan serta berkontribusi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata di Kawasan Teluk Tomini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengelolaan pariwisata menjadi lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Sumber daya manusia yang kompeten, serta menyusun program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses revitalisasi fungsi pemerintah daerah melalui pendekatan *agile governance* dalam pengelolaan pariwisata yang berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pariwisata di Teluk Tomini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam praktik tata kelola saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi pariwisata Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong perekonomian daerah. Hal ini didukung oleh keindahan alam yang unik, kekayaan budaya lokal, dan berbagai destinasi wisata yang beragam. Salah satu daya tarik utama di Gorontalo adalah keindahan alam bawah lautnya yang dapat dinikmati di Pantai Olele, yang terkenal dengan spot menyelam dan pemandangan bawah laut yang memukau. Pantai ini bahkan dijuluki sebagai *The Hidden Paradise* oleh wisatawan mancanegara. Selain itu, destinasi lain seperti Pulau Saronde dan Pulau Cinta dengan pantai berpasir putih dan fasilitas yang memadai juga berpotensi menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional.

Selain pesona alamnya, Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi wisata sejarah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Benteng Otanaha adalah salah satu ikon sejarah di Kota Gorontalo yang menyimpan banyak nilai historis dan menawarkan pemandangan indah Danau Limboto dari atas. Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Benteng Otanaha masih memerlukan perhatian khusus, terutama dari segi pemeliharaan fasilitas dan promosi wisata agar dapat menarik lebih banyak pengunjung. Jika dilakukan pengembangan secara optimal, Benteng Otanaha bisa menjadi pusat wisata edukasi dan sejarah yang menarik bagi wisatawan yang ingin memahami sejarah Gorontalo lebih dalam. Berikut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Benteng Otanaha Kota Gorontalo

Wisata alam dan sejarah, potensi wisata budaya di Gorontalo juga sangat besar. Berbagai tradisi lokal yang unik dan masih dilestarikan oleh masyarakat, seperti adat istiadat dan seni pertunjukan tradisional, dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan. Desa-desa wisata seperti Desa Bubohu yang menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan tradisi lokal adalah salah satu contoh bagaimana potensi ini bisa dikembangkan. Kegiatan pariwisata berbasis komunitas seperti ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga dapat memperkuat identitas budaya Gorontalo di mata wisatawan.

Berikut kita dapat melihat jumlah wisata yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan diagram berikut:

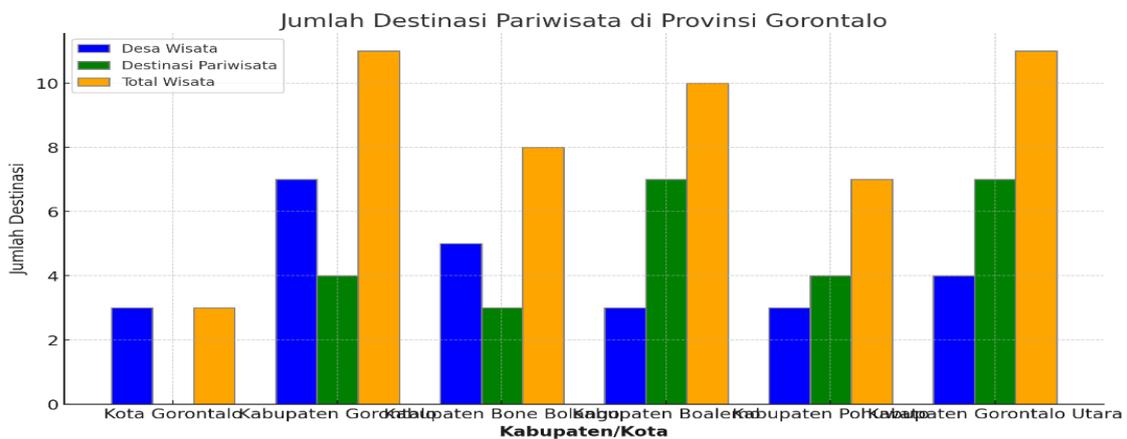


Diagram 1
Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo

Jumlah destinasi wisata di Provinsi Gorontalo, yang mencakup berbagai desa wisata dan destinasi pariwisata, menunjukkan potensi besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Meskipun beberapa kabupaten seperti Gorontalo dan Gorontalo Utara memiliki jumlah destinasi yang cukup tinggi, daerah lainnya seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato masih memiliki keterbatasan dalam hal kuantitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di Gorontalo belum merata dan memerlukan perencanaan strategis serta sinergi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, peningkatan promosi, perbaikan infrastruktur, dan optimalisasi manajemen destinasi perlu menjadi prioritas agar setiap wilayah dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Namun, meskipun memiliki berbagai potensi, pengembangan pariwisata di Gorontalo masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu kendala utama adalah minimnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pihak swasta. Konflik kepentingan dan ego sektoral seringkali menghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang terpadu dan menyeluruh. Selain itu, rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam industri pariwisata juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas layanan wisata di berbagai destinasi di Gorontalo. Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran yang sangat penting dalam industri pariwisata dan perhotelan, terutama dalam konteks kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung. Penelitian menunjukkan bahwa elemen manusia dalam organisasi pariwisata berkontribusi signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta keunggulan kompetitif organisasi (Aryaningtyas et al., 2020). Kualitas layanan yang tinggi tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada interaksi antara staf dan pengunjung, yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan karyawan (Mastarida, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif, termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan, pada gilirannya, kepuasan wisatawan (Puspa, 2023; Wulandami, 2023).

Dalam konteks destinasi wisata, kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan pariwisata sangat mempengaruhi citra destinasi dan loyalitas pengunjung. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kualitas layanan dan kepuasan pengunjung, yang berujung pada loyalitas mereka terhadap destinasi tersebut (Diarta & Sarjana, 2020; Trisnawati & Wibisono, 2022). Citra destinasi yang positif dapat dibangun melalui pengalaman layanan yang memuaskan, yang mencakup berbagai aspek seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan (Kanom & Darmawan, 2020a). Oleh karena itu, pengembangan strategi yang berfokus pada peningkatan

kualitas layanan dan pengelolaan SDM yang baik menjadi sangat penting untuk menarik dan mempertahankan wisatawan (Nurfaida et al., 2021; Setiawan, 2023). Selain itu, tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata sering kali berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti kebersihan lingkungan dan keamanan, yang juga mempengaruhi kualitas layanan (Kanom & Darmawan, 2020b). Oleh karena itu, penting bagi pengelola destinasi untuk menerapkan strategi pengembangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan, serta untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi SDM mereka (Aswaty & Anggraini, 2022; Usman et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan aktor pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media. Strategi pemasaran yang lebih agresif, termasuk digitalisasi promosi, serta pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas agar dapat meningkatkan daya saing pariwisata Gorontalo di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pendekatan yang tepat, potensi besar ini dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain itu dalam penelitian lebih menekankan pada revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata Gorontalo dan mengkaji lebih mendalam faktor penentu penerapan agile governance.

Proses revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian, proses revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama pada aspek sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyoroti bahwa kebijakan pengembangan pariwisata daerah belum efektif karena adanya ego sektoral di antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pelaku swasta, yang menyebabkan kebijakan sering kali berjalan secara individual tanpa adanya koordinasi yang baik. Sebagai hasilnya, pengelolaan destinasi wisata, seperti Lombongo, Benteng Otanaha, dan Pentadio Resort, berjalan secara parsial tanpa visi pembangunan yang terpadu.

Dikatakan oleh salah satu informasi perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

“Secara umum, pengelolaan pariwisata masih jauh dari kata optimal. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya kompetensi SDM lokal. Kami sudah beberapa kali mengadakan pelatihan, tetapi hasilnya belum terlihat signifikan dalam operasional sehari-hari. Banyak pegawai yang belum paham mengenai konsep pariwisata berkelanjutan, sehingga mereka kesulitan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang efektif di lapangan” (10 September 2024)

Berikut disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Wisata Lombongo terkait dengan keterlibatan masyarakat:

“Kami seringkali hanya dilibatkan saat ada acara besar, seperti kunjungan bupati atau event pariwisata. Setelah itu, perhatian dari pihak Dinas Pariwisata berkurang. Kami ingin lebih dari sekadar pelengkap. Kami ingin dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sehari-hari, karena yang paling tahu kondisi dan kebutuhan di lapangan adalah masyarakat yang tinggal di sini” (15 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara dengan para pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan masyarakat setempat, ditemukan bahwa ego sektoral menjadi hambatan utama dalam menciptakan program pengembangan yang komprehensif. Masyarakat di sekitar kawasan wisata merasa kurang dilibatkan dalam pengelolaan, sementara pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan komunitas lokal. Hal ini menyebabkan adanya resistensi dari masyarakat setempat yang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas pariwisata.

Data analisis dari Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa beberapa destinasi pariwisata utama di Gorontalo, seperti Pantai Olele, Pulau Saronde, dan Pulau Cinta, mencatatkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun internasional pada tahun 2018-2019. Namun, sejak pandemi Covid-19, terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 88,82% pada tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan pariwisata pada pasar internasional cukup tinggi. Selain itu, dari segi pendapatan, target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata untuk pengelolaan Pentadio Resort di tahun 2020 tidak tercapai, hanya menghasilkan Rp 487 juta dari target Rp 1,7 miliar. Dari perspektif aktor kebijakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan revitalisasi melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan aktor pentahelix (pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media). Melibatkan lebih banyak aktor dengan menetapkan peran yang jelas dapat membantu menurunkan konflik kepentingan dan memaksimalkan potensi wisata yang ada. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pengembangan SOP (Standard Operating Procedure) pengelolaan pariwisata yang berorientasi pada kepentingan bersama, serta meningkatkan pelatihan komunikasi dan keterampilan manajemen destinasi bagi pegawai dan masyarakat lokal.

Revitalisasi fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Gorontalo membutuhkan perbaikan dari segi koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya manusia agar dapat menciptakan pengelolaan pariwisata yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih inklusif serta memanfaatkan potensi kerjasama dengan sektor swasta untuk menutupi

keterbatasan anggaran dan meningkatkan daya saing pariwisata Gorontalo secara nasional dan internasional. Revitalisasi sektor pariwisata di Indonesia memerlukan perhatian serius terhadap pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah, namun sering kali dihadapkan pada tantangan serius terkait kekurangan SDM yang berkualitas. Menurut Umasugi, pemerintah daerah menghadapi masalah mendasar berupa kekurangan SDM dalam mengelola layanan pariwisata, yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut (Umasugi, 2023). Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan SDM dalam pengelolaan kawasan ekowisata menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pariwisata dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat dan manajemen SDM yang berbasis kompetensi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pegawai di sektor pariwisata.

Pendapat (Istiantara, 2019) menekankan pentingnya pengembangan manajemen SDM yang berbasis kompetensi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini relevan dengan sektor pariwisata, di mana peningkatan kompetensi SDM dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata. Selain itu, Kanom dan Darmawan mengidentifikasi bahwa kendala dalam pengelolaan pariwisata, seperti manajemen destinasi dan kebersihan lingkungan, dapat diatasi dengan strategi pengembangan yang tepat (Kanom & Darmawan, 2020b). Ini menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan dan manajemen SDM yang baik dapat mengatasi tantangan yang ada. Lebih lanjut, pengembangan SDM di sektor pariwisata harus mempertimbangkan aspek pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Menurut Adiyanti dan Nugraha, kinerja SDM yang baik sangat dipengaruhi oleh kompensasi dan pengembangan yang tepat (Adiyanti & Nugraha, 2023). Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti bahwa pelatihan yang berkelanjutan dan insentif yang sesuai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Selain itu, Nandi menekankan bahwa pengelolaan dan pengembangan SDM yang baik di sektor pariwisata harus melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat (Nandi, 2016). Ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengembangan kelembagaan dan SDM sangat penting untuk mencapai tujuan revitalisasi pariwisata.

Selain itu kelembagaan yang kuat sangat penting dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Margaretha (Margaretha, 2024), penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan merupakan bagian integral dari strategi capacity building dalam pengembangan pariwisata. Hal ini termasuk kerja sama antar stakeholder, promosi pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan program ekowisata. Koordinasi yang baik antar instansi dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses revitalisasi, seperti yang diungkapkan oleh (Kuhaja, 2014; Nurmawati et al., 2022). Mereka menunjukkan bahwa tanpa adanya kelembagaan

formal dan koordinasi yang baik, pengembangan pariwisata tidak akan berjalan efektif. Selain itu peningkatan sumber daya manusia sangat menentukan (Rachman et al., 2016).

Faktor-faktor Penentu penerapan pendekatan Agile Governance

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu penerapan pendekatan *Agile Governance* menunjukkan bahwa terdapat beberapa elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pendekatan ini, yaitu:

- 1) Penerapan pendekatan *Agile Governance* di Provinsi Gorontalo sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam implementasi kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya masalah komunikasi yang menyebabkan ketidakselarasan antara implementasi kebijakan dan target yang ingin dicapai. Masih banyak terjadi miskomunikasi antar lembaga, yang menyebabkan koordinasi yang kurang baik, serta kesulitan dalam menyelaraskan visi dan misi di lapangan. Kepemimpinan yang adaptif juga menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan penerapan *Agile Governance*. Pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan serta memiliki kemampuan untuk memimpin secara kolaboratif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif. Penelitian ini menemukan bahwa di tingkat pemerintah daerah, banyak kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan baik karena kurangnya dukungan dari pimpinan daerah untuk berinovasi. Para pemimpin sering kali lebih berfokus pada pencapaian target jangka pendek, yang menyebabkan kurangnya dorongan untuk berkolaborasi lintas sektor.
- 2) Faktor lain yang juga berperan signifikan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan penerapan *Agile Governance* sangat bergantung pada kualitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pegawai yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, serta berinovasi cenderung lebih mudah mendukung penerapan kebijakan yang responsif. Namun, dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Pariwisata, diketahui bahwa sebagian besar pegawai merasa belum memiliki keterampilan yang memadai, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital dan penerapan kebijakan yang berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada program peningkatan kapasitas SDM yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
- 3) Selain itu, konflik kepentingan antara berbagai aktor kebijakan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan *Agile Governance*. Ego sektoral dan perbedaan prioritas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sering kali menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana. Hasil wawancara dengan masyarakat

sekitar objek wisata menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah lebih menguntungkan sektor swasta, sementara masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan manfaat yang seimbang. Kondisi ini menyebabkan resistensi dari masyarakat yang berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif agar kepentingan semua pihak dapat diakomodasi.

- 4) Terakhir, digitalisasi dan inovasi kebijakan juga menjadi faktor penentu yang krusial dalam penerapan *Agile Governance*. Penggunaan teknologi digital dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan serta memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Gorontalo masih rendah, yang berdampak pada lemahnya promosi destinasi wisata dan kurang optimalnya pemasaran pariwisata secara digital. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan adopsi teknologi informasi serta mengembangkan strategi promosi yang lebih modern agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Faktor penentu dalam pendekatan *Agile Governance* sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut:

"Kolaborasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan setiap pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan sektor swasta, memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pengembangan pariwisata. Di Pulau Saronde, misalnya, setelah ada kerjasama dengan pihak swasta, memang terjadi peningkatan fasilitas, tetapi partisipasi masyarakat lokal perlu lebih didorong." (12 September 2024)

Uraian faktor penentu dalam pendekatan *Agile Governance* sebagaimana disampaikan oleh Staf Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pariwisata Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

"Kompetensi SDM di Dinas Pariwisata masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam bidang digitalisasi dan pemahaman konsep pariwisata berkelanjutan. Banyak pegawai yang masih kurang memahami konsep Agile Governance dan cenderung menggunakan pendekatan konvensional dalam mengelola kebijakan, sehingga implementasinya seringkali tidak adaptif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan." (10 September 2024)

Berikut informasi yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat di Desa Wisata Lombongo sebagai berikut:

"Kami berharap pemerintah lebih transparan dan mau mendengarkan masukan dari masyarakat setempat. Seringkali, kebijakan yang diterapkan lebih banyak menguntungkan pihak luar, seperti swasta, tanpa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Padahal, masyarakat lokal yang lebih memahami

kebutuhan di lapangan dan bisa membantu menjaga serta mengembangkan destinasi wisata ini." (15 September 2024)

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata sangat penting, karena dapat berdampak signifikan pada efektivitas kebijakan pariwisata. Penelitian (Tohopi et al., 2024) menekankan bahwa pemerintah daerah harus mensinergikan upayanya dalam pengembangan pariwisata, dengan fokus pada analisis pemangku kepentingan dan memahami motivasi individu dalam koalisi advokasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Ahmad et al., 2021) yang membahas peran Dinas Pariwisata Gorontalo selama pandemi Covid-19, menyoroti perlunya koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata bahkan di masa-masa sulit. Selain itu, Mopangga dan Puhi menegaskan bahwa pariwisata adalah sektor unggulan pendapatan daerah di Gorontalo, sehingga memerlukan perencanaan strategis dan implementasi kebijakan untuk memaksimalkan manfaatnya (Mopangga & Puhi, 2019). Tidak hanya itu, dukungan infrastruktur sangat menentukan perkembangan dan kemajuan pariwisata (Hasan et al., 2025).

Tata kelola yang tangkas muncul sebagai pendekatan penting dalam mengelola pengembangan pariwisata, terutama dalam menanggapi tantangan dinamis seperti pandemi. (Ramadyah et al., 2022) menggambarkan tata kelola yang tangkas sebagai kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, yang penting bagi organisasi publik yang terlibat dalam pariwisata. Konsep ini lebih lanjut didukung oleh temuan Bhatti dan Nawaz, yang membahas pentingnya kelincahan dalam rantai pasokan pariwisata, menekankan bahwa organisasi harus dapat dengan cepat merespons perubahan permintaan pasar dan kondisi lingkungan (Bhatti & Nawaz, 2020), selain itu dalam tata Kelola pemerintahan yang baik maka perlu menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Masyarakat (Abdussamad et al., 2024).

Penerapan tata kelola yang tangkas di Gorontalo dapat meningkatkan daya tanggap kebijakan dan praktik pariwisata, sehingga meningkatkan kinerja pariwisata secara keseluruhan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting. Keberhasilan inisiatif pariwisata seringkali bergantung pada partisipasi lokal dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya, Butolo menyoroti potensi geoproduct dalam mengembangkan pariwisata lokal dan mendukung UMKM di Gorontalo (Butolo, 2022). Hal ini digaungkan oleh Turambi, yang mencatat bahwa pemerintah daerah harus aktif terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk memenuhi berbagai aspek, termasuk transportasi dan promosi (Turambi et al., 2023). Integrasi inisiatif pariwisata berbasis masyarakat dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan, menguntungkan ekonomi lokal dan pelestarian warisan budaya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Agile Governance dalam pengelolaan pariwisata di Teluk Tomini, Gorontalo, memberikan dampak positif terhadap revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendekatan ini memungkinkan tata kelola yang lebih fleksibel, cepat, dan responsif terhadap perubahan, serta mampu memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi masih mencakup ego sektoral, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kompetensi SDM lokal. Oleh karena itu, penerapan Agile Governance perlu dilengkapi dengan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dan pelatihan SDM yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang lebih optimal.

Penerapan Agile Governance di sektor pariwisata dapat membawa implikasi yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan publik dan pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Agile untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalisir birokrasi yang kaku. Kedua, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.

Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mengatasi ego sektoral yang menghambat penerapan Agile Governance, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat lokal untuk menciptakan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM lokal secara berkelanjutan agar mereka mampu mengelola destinasi wisata secara profesional dan memanfaatkan teknologi digital dengan efektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor ini secara signifikan dan berkelanjutan.

Kekuatan penelitian ini terletak pada pengenalan konsep Agile Governance yang masih jarang diterapkan dalam pengelolaan pariwisata, memberikan perspektif baru yang relevan. Selain itu, penggunaan wawancara mendalam menghasilkan wawasan yang kaya mengenai tantangan tata kelola pariwisata di Teluk Tomini, serta fokus pada revitalisasi kelembagaan yang memberi kontribusi signifikan pada teori tata kelola pemerintahan. Namun, kelemahan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang membatasi generalisasi hasil dan kurangnya pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas Agile Governance. Selain itu, karena Agile Governance masih dalam tahap awal penerapannya di Gorontalo, data terkait implementasinya terbatas, dan aspek teknis pengelolaan pariwisata belum dibahas secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sakir, M., & Dunggio, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Wongkaditi Timur. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(1), 353–361. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.1132>
- Adiyanti, S. A., & Nugraha, E. (2023). Pengaruh Kompensasi Finansial Dan Kompensasi Non-Finansial Terhadap Kinerja Karyawan. *Remik (Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer)*, 7(1), 166–176. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.11997>
- Ahmad, F., Arman, A., & Dunggio, S. (2021). Peran Dinas Pariwisata Kota Gorontalo Dalam pengembangan Pariwisata Dimasa Pandemi Covid-19. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i1.39>
- Aneta, Y., Prahara, S., Aneta, A., & Ahmad, J. (2023). Bureaucratic Transformation Optimizing Village Bureaucracy Transformation: Gorontalo, Indonesia. *Policy & Governance Review*, 7(3), 211. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i3.775>
- Aryaningtyas, A. T., Th, A. D. M., & Aprilliyani, R. (2020). Meningkatkan Kreativitas Kinerja Karyawan Hotel: Dukungan Kepribadian, Emosional, Dan Lingkungan. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 136. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i1.161>
- Aswaty, F. N. A. J., & Angraini, R. (2022). Pengaruh Service Quality, Price, Tourist Experience Dan Overall Satisfaction Terhadap Revisit Intention Wisatawan Di Kota Batam. *Value Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 17(2), 102–117. <https://doi.org/10.32534/jv.v17i2.2755>
- Bhatti, M. A., & Nawaz, M. A. (2020). The Impacts of Tourism Risk Management, IT Adoption, Agility and Resilience on the Sustainable Tourism Supply Chain Performance of Maldives' Tourism Industry. *Irasd Journal of Management*, 2(2), 100–108. <https://doi.org/10.52131/jom.2020.0202.0020>
- Butolo, I. (2022). Development of Micro, Small, and Medium Enterprises Through Geoproducts for Geopark Gorontalo. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 251–262. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.251-262>
- Danar, O. R., Novita, A. A., Anggriawan, T., & Ramadhani, E. F. (2024). Between Productivity Booster and Structural Resistance: A Trajectory and Limit of Agile Governance. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1 Special issue), 341–349. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1siart8>
- Diarta, I. K. S., & Sarjana, I. M. (2020). Pengaruh Atribut Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Daya Tarik Wisata Pertanian Subak Di Kota Denpasar Bali. *Media Konservasi*, 25(2), 113–123. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.2.113-123>

- Hasan, K. K., Otto, N. M., Mokodongan, R., Yusuf, N., & Abas, S. R. (2025). Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bone Bolango. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(2), 803–814. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i2.1805>
- Istiantara, D. T. (2019). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Guna Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia. *Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal)*, 3(2), 93–101. <https://doi.org/10.37367/jpi.v3i2.89>
- Kanom, K., & Darmawan, R. N. (2020a). No Title. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(2), 84. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i2.1390>
- Kanom, K., & Darmawan, R. N. (2020b). Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(2), 84. <https://doi.org/10.30647/jip.v25i2.1390>
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Yang Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 10(3), 278. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i3.7785>
- Luqmani, S. I., & Tamrin, M. H. (2022). Pemanfaatan Aplikasi e-Master dalam Perspektif Agile Governance. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 25(2), 93–101. <https://doi.org/10.30649/aamama.v25i2.141>
- Margaretha, R. (2024). Strategi Capacity Building Dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(1), 248–256. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3588>
- Masterida, F. (2023). Hubungan Kualitas Layanan, Pengalaman Konsumen, Kepuasan Konsumen, Dan Loyalitas Konsumen: Model Konseptual. *Arbitrase Journal of Economics and Accounting*, 3(3), 521–526. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.702>
- Mopangga, H., & Puhi, F. (2019). Gorontalo Province Tourism: Leading Sector in the Middle of Weakness and Challenge. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1997>
- Nandi, N. (2016). Pariwisata Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1689>
- Nurfaida, N., Arifin, H. S., Sitorus, S. R., & Eriyatno, E. (2021). Persepsi Wisatawan Terhadap Objek Wisata Dan Pengelolaannya Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Tataloka*, 23(4), 496–510. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.4.496-510>
- Nurmawati, N., Harahap, R. G., Putri, D. L., Dianiswara, A., Wirawan, M. K., Huda, A. C., & Rahayuningsih, S. (2022). Revitalisasi Pantai Cemara Sebagai Salah Satu Objek Pariwisata Asri Di Kota Balikpapan. *Sinar Sang Surya Jurnal Pusat*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386.
<https://doi.org/10.24127/sss.v6i2.2196>
- Puspa, T. (2023). Faktor-Faktor Kunci Sikap Manajemen (Managerial Behaviour) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2481–2494.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16921>
- Rachman, E., Gintulangi, S. O., & Gorontalo, S. B. T. (2016). Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Terjun Bondula Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 3(1), 1–7.
<https://doi.org/10.37606/publik.v3i1.59>
- Ramadyah, S., As'ari, H., & Melani, N. L. (2022). Agile Governance in Handling the Covid-19 Pandemic by the Kampar District Health Office in 2021. *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), 204–214.
<https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21148>
- Saputri, A. H., Lestari, G. A. M. D. L., & Ningrum, W. R. (2021). Revitalisasi Cangget Bakha Festival Di Kabupaten Lampung Utara. *Geter*, 4(1), 47–57.
<https://doi.org/10.26740/geter.v4n1.p47-57>
- Setiawan, H. (2023). Sikap Pengunjung Sebagai Mediasi Antara Citra Destinasi, Persepsi Nilai, Kualitas Layanan, Dan Loyalitas Pengunjung Wisata Pantai. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(6), 1364–1377.
<https://doi.org/10.24912/jmbk.v7i6.24120>
- Tohopi, R., Aneta, Y., A. Hulinggi, P., & Ahmad, M. (2024). Tourism Development Policy in Tomini Bay Area Gorontalo, Indonesia. *Kne Social Sciences*, 649–663.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15537>
- Trisnawati, R., & Wibisono, N. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan, Ketersediaan Produk Wisata, Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Destinasi Kampung Karuhun Sumedang. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(3), 238–247. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i3.238-247>
- Turambi, J. R., Koton, Y. P., & Nggilu, R. (2023). Implementation of the Regional Government's Regional Tourism Development Master Plan Policy in the Development of the Tourism Sector at the Tree of Love Beach Tourist Attraction Pohuwato Regency. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(12), 2230–2233. <https://doi.org/10.55248/gengpi.4.1223.123442>
- Umasugi, M. (2023). Pemetaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Nusliko, Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(1), 100–116.
<https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2885>
-

- Usman, A., Hidayat, M., & Daud, A. (2022). Pengaruh Bauran Pemasaran Pariwisata Dan Kualitas Pelayanan Melalui Kepuasan Wisatawan Terhadap Minat Berkunjung Kembali (Studi Empiris Pada Obyek Wisata Bantimurung Kabupaten Maros). *Nobel Management Review*, 3(3), 527–541. <https://doi.org/10.37476/nmar.v3i3.3289>
- Wulandami, T. (2023). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jimak*, 2(2), 35–42. <https://doi.org/10.55606/jimak.v2i2.1437>